

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA H SELAKU
PELAKSANA TUGAS KEPALA KELURAHAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Nama : Aldi Resa Anugra Seran
Jurusan/Progam Studi: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

ABSTRAK

Abstrak – Penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana H Selaku Pelaksana Tugas Kepala Kelurahan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan membahas permasalahan apakah H yang telah melakukan penggelapan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian dengan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: bahwa H dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas penggelapan yang telah dilakukannya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena semua unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. perbuatan yang dilakukan oleh H sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan H sudah dengan sengaja menjaminkan sertipikat No. 234 atas nama DM sebagai pengganti jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada AS yang dilakukannya sebelumnya tanpa izin dari pemilik sah atas sertipikat tersebut yaitu DM; b. H melakukan perbuatan tersebut atas dasar jabatan yang diembannya pada saat itu selaku Plt. Kepala Kelurahan sehingga sertipikat tersebut dapat berada dalam penguasaannya; c. H termasuk orang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi semua unsur-unsur.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan Dalam Jabatan, Tindak Pidana Korupsi.

CRIMINAL LIABILITY OF H AS THE ACTING HEAD OF THE VILLAGE VIEWED FROM THE LAW NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING THE AMENDMENT OF LAW NUMBER 31 OF 1999 CONCERNING THE ERADICATION OF THE CRIME OF CORRUPTION

Name : Aldi Resa Anugra Seran
Department/Study Program : Law/Legal Studies
Advisor : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

ABSTRACT

Abstract – This study entitled criminal liability of h as the acting head of the village viewed from the Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of the Crime of Corruption would like to discuss the problem whether H who committed embezzlement could be charged based on Article 8 Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of the Crime of Corruption. This study used a law, concept, and case approach. The result of the study was H could be charged for the crime of embezzlement based on Article 8 Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of the Crime of Corruption because all of the elements in the article were fulfilled for the following reasons: a. The action committed by H was with clear intention to do the action, and H had intentionally pawned the certificate number 234 that belongs to DM as the guarantee of the loan of Rp. 11.000.000,- (eleven million rupiahs) to AS, and he did it without the permission from the rightful owner of the certificate, DM; b. H committed the crime on the ground that he was the Acting Head of the Village, so the certificate was under his control; c. H was included as the person who could be criminally liable because he had fulfilled all the elements.

Keywords : Criminal Liability, Embezzlement in Office, Corruption.